



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.1, Juni 2018

TURBULENSI KEPEMIMPINAN DAN KONEKTIVITAS ANTAR NEGARA

- Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un
- Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016
- Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia:
Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas
- Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia
- Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka:
City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

RESUME PENELITIAN

- Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

REVIEW BUKU

- Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1-127	Jakarta, Juni 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un Indriana Kartini	1–13
• Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016 Meutya Viada Hafid	15–30
• Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas Arif Novianto, dkk	31–48
• Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia Siswanto	49–63
• Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: <i>City to City Connectivity</i> sebagai Pendukung Koridor Ekonomi Awani Irewati	65–80
Resume Penelitian	
• Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk	81–96
• Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab M. Fakhry Ghafur, dkk	97–113
Review Buku	
• Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen Defbry Margiansyah	115–125
Tentang Penulis	127–128
Pedoman Penulisan	129–133

CATATAN REDAKSI

Kepemimpinan politik mengalami dinamika menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Tak pelak kondisi tersebut menimbulkan konsolidasi di tingkat kepemimpinan maupun justru sebaliknya menimbulkan turbulensi. Meski demikian, konsensus merupakan upaya yang mesti dilakukan dalam menjaga stabilitas nasional maupun hubungan antar negara.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan. Artikel pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini berjudul "DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN", menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom.

Artikel berikutnya, "KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016". Artikel yang ditulis oleh Meutya Viada Hafid ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016.

Sementara itu, artikel "DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS" yang ditulis oleh Arif Novianto, dkk mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme.

Turbulensi kepemimpinan di Amerika Serikat juga dibahas dalam artikel "KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA" yang ditulis oleh Siswanto. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Artikel terakhir membahas tentang "DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI" yang ditulis oleh

Awani Irewati. Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Selain kelima artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan Nostalgawan Wahyudi, “PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB”. Tulisan ini mengulas berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas

dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif.

Naskah kedua, “POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK”, ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, dan Yusuf Maulana. Tulisan ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Adam Bower “NORMS WITHOUT THE GREAT POWERS: INTERNATIONAL LAW AND CHANGING SOCIAL STANDARDS IN WORLD POLITICS”. *Review* yang ditulis Defbry Margiansyah menelaah tentang institusi internasional dan aturan-aturannya dekade belakangan dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana

dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemimpinan maupun konektivitas antar negara. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG- UN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 1-13

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

Kata kunci: Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 15-30

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI, tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kata kunci: Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodra Wibawa

DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 31-48

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut.

Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tanggapan menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

Kata kunci: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

DDC: 321.804273

Siswanto

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 49-63

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh pertimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian inkonsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (America First) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (make America great again) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian inkonsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Kata kunci: kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 65-80

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Kata kunci: kerja sama subregional, *city to city connectivity*, koridor ekonomi, Selat Malaka

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

RESUME PENELITIAN
POLA PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA OTONOMI
KHUSUS DAN ISTIMEWA:
PERSPEKTIF POLITIK

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 81-96

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan

antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

Kata kunci: pengawasan, dana otsus/istimewa, perspektif politik.

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

RESUME PENELITIAN
PROBLEMATIKA KEKUATAN
POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI,
KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 97-113

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman,

penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang terkait dengan pokok kajian.

Kata kunci: Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

DDC: 341

Defbry Margiansyah

REVIEW BUKU

KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 115-125

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi

tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Kata kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

**PANMUNJOM DECLARATION AND
KOREAN PEACE PROSPECTS IN
MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN
ERA**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 1-13

The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.

Keywords: Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

**POLITICAL CONSENSUS ON
GOLKAR PARTY CONFLICT IN
2014-2016**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 15-30

This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from

Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order; while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

Keywords: Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan and Samodra Wibawa

DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD-LEFT PARTY PERSPECTIVES

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 31-48

Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such

changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.

Keywords: Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party

DDC: 321.804273

Siswanto

LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 49-63

The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.

Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 65-80

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

Keywords: subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

SUMMARY RESEARCH
THE CONTROL PATTERN OF
SPECIAL FUND MANAGEMENT:
POLITICAL PERSPECTIVE

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 81-96

This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or

horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.

Keywords: controlling, special fund, a political perspective

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

SUMMARY RESEARCH
PROBLEMS OF THE POWER OF
POLITICAL ISLAM IN SAUDI
ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT
ARAB

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 97-113

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has become catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Constitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks. To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in saudi arabia (Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts,

academics at several universities and figures related with the subject matter.

Keywords: *Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates*

DDC: 341

Defbry Margiansyah

BOOK REVIEW

THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 115-125

For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaining influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of “nested” social structure of international law. This research shows how social dimension of normative

international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court’s comparative case study. This article aims to highlight and review the book’s analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law’s implementation promoted by “non-great power” multilateral institution will come up prior to concluding remarks.

Keywords: *Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT*

REVIEW BUKU

KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN

BOOK REVIEW

THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS

Defbry Margiansyah

Peneliti Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI)
Email: defbry@yahoo.com

Diterima: 2 April 2018; direvisi: 30 April 2018; disetujui: 4 Juni 2018

Judul Buku : *Norms Without The Great Powers: International Law and Changing
Social Standards in World Politics*
Pengarang : Adam Bower
Penerbit : Oxford University Press
Tahun Terbit : 2017
Tebal : 288 + xxii

Abstract

For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaining influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of “nested” social structure of international law. This research shows how social dimension of normative international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court’s comparative case study. This article aims to highlight and review the book’s analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law’s implementation promoted by “non-great power” multilateral institution will come up prior to concluding remarks.

Keywords: *Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT*

Abstrak

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (*great powers*). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi *great powers*, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk

dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “*non-great powers.*”

Kata kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

Pendahuluan

Dewasa ini dunia menyaksikan bagaimana dinamika hubungan internasional menghadapi ketidakpastian, dampak dari turbulensi politik global. Kompleksitas turbulensi politik ini terefleksikan dalam isu-isu internasional kontemporer, mulai dari kegagalan organisasi internasional dalam perang Suriah, referendum Catalunya, *Brexit*, krisis ekonomi global, masalah pengungsi, sampai kebangkitan populisme kanan diberbagai penjuru dunia. Fenomena ini mempengaruhi konfigurasi pola hubungan aktor-aktor politik dunia, serta konsekuensinya. Hal ini menyebabkan keraguan akan keberfungsian multilateralisme¹ dalam penyelesaian permasalahan global, berimbas pada kembalinya sentimen unilateralisme, seperti politik luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald J. Trump.²

Dari serangkaian fenomena di atas, menarik untuk cermati secara lebih seksama yaitu respons dunia internasional mengenai langkah kontroversial Trump, dalam keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel sebagai solusi untuk mempercepat proses perdamaian Israel-Palestina.³ Penolakan keras

masyarakat internasional terhadap maneuver politik Trump ini termanifestasikan dari hasil voting resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), didukung 128 negara termasuk negara sekutu AS; Inggris, Prancis, Jerman dan Jepang, untuk membatalkan keputusan AS soal pengakuan terhadap Yerusalem ini.⁴ Tentu fenomena tersebut memunculkan tanda tanya baru tentang pengaruh dan kekuatan AS sebagai satu-satunya *superpower*, yang diasumsikan memiliki kapasitas yang besar untuk mendikte keputusan dan memobilisasi dukungan Negara-negara lain bagi kepentingannya ditingkat internasional.

Dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional (HI), hegemoni AS dan sistem internasional yang anarkis merupakan asumsi dominan dari tradisi pemikiran neo-realisme dan neoliberal institusionalisme dalam memahami arah dan tujuan organisasi internasional, yang sangat akomodatif terhadap kepentingan nasional Negara-negara kekuatan besar, terutama AS. Termasuk keyakinan akan sebuah keberhasilan institusi internasional ditentukan oleh keterlibatan dan kepemimpinan Negara-negara dengan kapasitas materiil yang besar, sebuah persepsi populer bagi khalayak banyak dan bagi pembuat kebijakan dalam memandang politik internasional.⁵

middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html, diakses pada 7 Maret 2018.

¹ United Nations, “*Syrian Tragedy ‘Shames Us All’, Secretary-General Tells Security Council, Saying that Failure to End Conflict Should Haunt Entire Membership.*” <https://www.un.org/press/en/2016/sc12526.doc.htm>, diakses pada 7 Maret 2018.

² Ian Bremmer, “*Donald Trump’s Foreign Policy Is a Black Box.*” <http://time.com/4564673/president-donald-trump-foreign-policy/>, diakses pada 7 Maret 2018.

³ Mark Landder, “*Trump Recognizes Jerusalem as Israel’s Capital and Orders U.S. Embassy to Move.*” <https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/>

⁴ Michelle Nichols, “*Defying Trump, over 120 countries at U.N. condemn Jerusalem decision.*” <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel-un/defying-trump-over-120-countries-at-u-n-condemn-jerusalem-decision-idUSKBN1EF2D5>, diakses pada 7 Maret 2018.

⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan*

Namun demikian, terdapat pertanyaan-pertanyaan baru muncul seputar dominasi Negara kuat dalam institusi internasional seperti; mengapa maneuver politik Negara-negara kekuatan besar dapat dibatasi atau ditundukkan oleh institusi internasional melalui interpretasi aturan-aturan yang bertentangan dengan kepentingannya? dan bagaimana kerjasama multilateral dapat berjalan secara ideal di tengah arus penolakan Negara-negara kuat?. Hal tersebut tentu menjadi tantangan baru bagi ortodoksi paradigma arus-utama yang memiliki keterbatasan dapat memotret gambaran yang terjadi dalam politik dunia secara keseluruhan.

Dengan demikian, tulisan ini bermaksud untuk mengulas dan menelaah kontribusi akademik seorang sarjana Hubungan Internasional dalam buku berjudul *Norms Without Great Powers*, sebuah karya intelektual yang dimulai dari hasil disertasi doktoral penulis di *University of British Columbia*. Secara umum publikasi ini memberikan penjelasan tentang kemungkinan kerjasama internasional yang bebas dari intervensi dan dikte kepentingan negara-negara kekuatan besar. Agar dapat mewujudkan pemerintahan global yang independen dan penegakan hukum internasional yang adil dan imparial. Kajian yang pada dasarnya merefleksikan usaha untuk menguraikan kompleksitas dalam turbulensi politik dunia kontemporer.

Memahami Institusi “Non-Great Powers” dan Kekuatan Norma

Melalui karyanya, Adam Bower memberikan perhatian utama studinya dalam fenomena dinamika norma internasional di dalam isu hukum dan politik internasional. Dengan tujuan untuk memahami prospek, permasalahan dan keterbatasan untuk mewujudkan institusi⁶

Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 17-21.

⁶ Institusi juga diistilahkan sebagai rezim yang berarti seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan kebijakan baik secara eksplisit maupun implisit, dimana harapan aktor-aktor internasional berpusaran disekitarnya dan terjadi di berbagai bidang dalam hubungan internasional. Lihat: Robert O. Keohane, *The Demand for International Regimes*, International Organization, Volume 36, Issue 2 Spring

internasional atau *global governance* di tengah ambivalensi negara-negara kekuatan besar. Lebih spesifik mengenai upaya dalam menciptakan hukum internasional yang kuat dan independen, sebagai instrumen untuk membatasi dan mengkonter siasat negara-negara *great powers* melalui proses penerjemahan norma-norma universal ke dalam bentuk konkret seperti aturan dan perjanjian multilateral.⁷

Kajian ini muncul terinspirasi dari pengalaman sukses praktik “diplomasi baru” dalam menyaingi kekuatan *great powers* pada isu keamanan, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Istilah “diplomasi baru” merujuk pada aliansi diplomatik dari gabungan negara-negara kekuatan menengah dan kecil (*small-middle powers*) dengan aliansi masyarakat madani transnasional (*transnational civil society*). Aktor yang terlibat dalam “diplomasi baru” merupakan pendukung utama pemberlakuan hukum internasional yang diformulasikan dengan basis norma-norma universal alternatif di dalam suatu institusi multilateral untuk menjamin independensi penegakan aturan-aturan yang berlaku dan implementasi keputusan yang disepakati. Studi ini menggambarkan bagaimana koalisi aktor-aktor tersebut menggunakan saluran diplomatik dalam menghasilkan aturan-aturan mengikat dan restriktif bagi semua negara-negara, termasuk negara berkekuatan material besar. Kesuksesan tersebut berhasil membentuk apa yang Bower istilahkan sebagai hukum “*non-great power*.”⁸

Namun, bagi kelompok skeptis, penekanan pada peran hukum internasional normatif dan “diplomasi baru” dalam konfigurasi politik internasional yang anarkis dianggap naif karena gagal mengidentifikasi peran krusial negara-negara berkekuatan besar dalam mengawal jalannya kerjasama antar-negara dan penegakan kesepakatan hukum internasional. Faktor dominasi dan kekuatan *great powers*

1982, hlm. 325.

⁷ Adam Bower, *Norms Without Great Powers: International Law and Changing Social Standards in World Politics*, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 2.

⁸ *Ibid*.

merupakan faktor yang tak dapat dikompromikan bagi efektivitas implementasi kesepakatan-kesepakatan dalam institusi internasional.⁹ Asumsi analitis ini sejak lama telah beresonansi dengan pandangan populer baik kelompok elit dan publik umum, mengingat unipolaritas AS di abad 21 semakin tak terbantahkan.¹⁰

Selanjutnya, struktur legal formal ini dioperasionalkan melalui *platform* institusi multilateral untuk menciptakan standar perilaku yang pantas (*standard of appropriate behaviour*) bagi seluruh aktor internasional tanpa terkecuali, baik anggota formal maupun bukan.¹¹ Dengan demikian, hal ini mengisyaratkan usaha penulis untuk menantang perspektif arus utama HI yang memandang peran Negara-negara *great power* merupakan faktor determinan bagi keberhasilan institusi dan kerjasama multilateral, yang mana berimplikasi negatif bagi efektivitas dan integritas institusi internasional. Poin di atas merupakan *state of the art* dalam tulisan akademik ini.

Berkaitan dengan itu, buku ini dimaksudkan untuk mengevaluasi performa dan implementasi dari pembentukan institusi “*non-great power*” di tengah arus pengaruh dan resistensi Negara-negara kuat terhadap aturan main institusi dan ketertataannya dalam sistem internasional. Khususnya pada keberhasilan atau kegagalan perjanjian-perjanjian multilateral formal dalam memperkuat legitimasi sosial dan proses internalisasi norma-norma global dalam rangka mewujudkan kondisi hubungan internasional, institusi internasional independen dan multilateralisme yang berlandaskan hukum dan norma-norma universal. Berangkat dari asumsi dasarnya bahwa kesepakatan baru dalam pembentukan aturan internasional merupakan fase lanjutan dari proses pengembangan norma-norma yang mana pertanyaan mengenai ketaatan dan kontestasi merupakan persoalan hukum internasional yang berlaku.¹²

⁹ Jack Goldsmith, “The Self-Defeating International Criminal Court,” *The University of Chicago Law Review*, Vol. 70, No. 1, Centennial Tribute Essays (Winter, 2003), hlm.89-104.

¹⁰ Chris Brown, “Do Great Powers Have Great Responsibilities? Great Powers and Moral Agency,” *Global Society*, Vol. 18, No.1 (January, 2004).

¹¹ Adam Bower, *Norms Without Great Powers...*,

¹² *Ibid.* hlm. 27.

Tujuan ini merupakan refleksi dari sedikitnya perhatian dalam isu penting terkait perlawanan masyarakat internasional terhadap *status quo* negara-negara kuat dalam institusi global, dan juga ketidacukupan karya intelektual dalam memberikan penjelasan terkait usaha untuk mengembangkan aturan-aturan internasional yang independen dan bebas dari intervensi Negara kuat. Studi ini berangkat dari motivasi untuk kontribusi dalam perdebatan baik konseptual maupun kebijakan praktis tentang masa depan multilateralisme dan pemerintahan global melalui studi empiris yang keterkaitan dengan interaksi antara hukum dan politik dalam hubungan internasional.¹³

Dalam mendukung analisisnya, kajian ini menggunakan pendekatan konstruktivis dengan asumsi bahwa realita merupakan hasil dari konstruksi sosial yang intersubjektif.¹⁴ Melalui perspektif ini, Bower memandang hukum internasional tidak sekedar “*hard law*” atau kumpulan instrumen legal formal yang mengikat dan alat koordinasi referensi. Tapi lebih merupakan legitimasi sosial yang termanifestasi di dalam seperangkat kesepakatan intersubjektif yang dihasilkan dari interaksi dinamis antara aktor-aktor global, dimana praktek sosial ini melekat dan saling terhubung di dalam jejaring sistem sosial dengan meliputi prinsip-prinsip, norma, aturan, dan ekspektasi kolektif yang berlaku dalam sistem internasional yang lebih luas. Pandangan hukum dengan kualitas jejaring ini dilihat sebagai sumber utama legitimasi dalam hubungan antarnegara. Karakteristik hukum internasional berdasarkan konseptualisasi demikian diistilahkan sebagai “*jejaring struktur sosial dalam hukum internasional*” (*nested social structure of international law*).¹⁵

Dengan asumsi demikian, argumentasi teoritis yang dibangun oleh Bower yaitu institusi legal memiliki kapasitas yang sangat besar dalam membentuk praktek hubungan internasional. Hal ini dikarenakan hukum internasional

¹³ *Ibid.* hlm. 3-5.

¹⁴ Robert Jackson & Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches 5th Edition*, (Oxford University Press, 2013), hlm. 211-212.

¹⁵ Adam Bower, *Norms Without Great Powers...*, hlm. 15.

yang mendasari institusi itu menjadi acuan dasar dalam mendefinisikan bentuk-bentuk perilaku dan tindakan yang dianggap pantas dan dapat diterima (norma atau standar sosial intersubjektif) secara universal oleh sistem internasional. Didasari dengan pemahaman “jejaring struktur sosial hukum internasional,” studi ini berpandangan bahwa kapabilitas materiil bukan merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi jalannya relasi antar aktor dan institusi internasional. Tetapi pemaknaan intersubjektif terhadap norma dan diterjemahkan dalam bentuk aturan-aturan internasional yang konkret, memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku dan tindakan aktor-aktor internasional, termasuk *great powers*, dalam mencapai kepentingannya. Implikasi dari konfigurasi normatif ini yaitu membatasi tindakan dan memberikan hambatan besar bagi *great powers* untuk menggunakan kapabilitas materiil (militer dan teknologi) dalam menginstrumentalisasi institusi multilateral.¹⁶

Konsepsi hukum internasional dengan efek “jejaring struktur sosial” merupakan argumentasi sentral untuk menjelaskan bagaimana institusi *non-great power* menundukkan perlawanan dan kepentingan parsial negara-negara besar. Dengan memainkan peran sebagai *legal community*,¹⁷ multilateralisme *non-great-powers* dapat memunculkan kesan positif bagi publik karena dipandang sebagai promotor norma-norma ‘baik’ dan ‘beradab’ yang berlandaskan nilai-nilai humanitarisme, untuk menciptakan sistem internasional yang independen dan adil. Segala bentuk penolakan dan resistensi terhadapnya dipandang anomali dalam pergaulan dan interaksi sosial masyarakat internasional. Semakin besar perlawanan negara-negara besar terhadap pemberlakuan institusi *non-great powers* akan berkonsekuensi pada tekanan sosial yang semakin kuat untuk menghormati otoritas legal dan mengakui legitimasi aturan-aturan yang

dipromosikan, seberapa kuat pun kapabilitas materiil.¹⁸

Dapat diartikan bahwa pembahasan buku ini telah menawarkan narasi baru untuk memahami dan bagaimana seperangkat aturan formal dan norma internasional sebagai sumber legitimasi menjadi instrument efektif untuk mematahkan dominasi aktor-aktor besar dalam penegakan hukum internasional dan mempengaruhi dinamika politik global. Kepatuhan terhadap hukum dan norma internasional merupakan amunisi penting bagi negara *non-great powers* untuk menciptakan perubahan internasional dan standar perilaku sosial dalam politik dunia.¹⁹ Selain itu, kajian ini mengklaim bahwa institusi multilateralisme yang berbasis struktur normatif tidak hanya sebagai perangkat untuk mengordinasikan preferensi, tetapi juga sebagai saluran bagi aktor *non-great powers* untuk mengintroduksi pemikiran baru mengenai standar kepatutan berperilaku dalam persoalan luar negeri dan hubungan internasional.²⁰

Manifestasi Institusi “Non-Great Powers”: MBT dan ICC

Dalam menguji kekuatan argumentasinya, buku ini menggunakan dua studi kasus yaitu *the Mine Ban Treaty* (MBT) dan Statuta Roma *International Criminal Court* (ICC). Kasus ini dipilih karena memiliki pola serupa dan koherensi konseptual dari studi ini, dimana “diplomasi baru” berhasil dalam menciptakan institusi multilateral baru ditengah perlawanan aktor *great powers*. Walaupun fokus dan pembahasan berbeda, kedua kasus ini pada hakikatnya memiliki arah yang sama yaitu menghalangi penggunaan kekerasan baik secara kolektif maupun individu negara.²¹ Sehubungan dengan ini, perhatian utama dalam bagian ini adalah untuk memotret dinamika implementasi hukum dan pengembangan norma yang dihasilkan oleh koalisi antara negara menengah dan kecil dan aliansi *civil society* transnasional.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 27.

¹⁷ Adalah Komunitas negara-negara yang mengedepankan legalitas hukum, legitimasi, komitmen terhadap norma internasional sesuai dengan ekspektasi sosial dan standar sosial internasional yang intersubjektif (Lihat: Bower, *Norms Without Great Powers...*, 2017, hlm. 40-43).

¹⁸ Adam Bower, *Norms Without Great Powers...*, hlm. 43-46.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 46.

²⁰ *Ibid.* hlm. 47.

²¹ *Ibid.* hlm. 22.

Pada kasus MBT, norma yang dibangun adalah pelarangan dan pemusnahan penggunaan ranjau anti-personel secara total karena bertentangan dengan hukum humanitarian internasional. Jenis senjata ini dipandang memiliki resiko tinggi bagi sipil dan *humanitarian cost*. Traktat MBT ini didukung oleh sebagian besar negara kekuatan menengah-kecil dan beberapa negara kuat, dan ditentang oleh negara kekuatan militer yang dipimpin oleh AS. Ekspektasi sosial yang terkonstruksi dalam norma ini menandai bahwa traktat MBT merupakan standar internasional baru dalam mengukur perilaku baik suatu negara yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.²² Menggunakan *framing* prinsip-prinsip kemanusiaan, hal ini berdampak signifikan bagi *great powers* untuk terlibat di dalam diskursus norma MBT. Studi ini membuktikan bahwa *great powers* dan negara penentang lainnya pada awalnya mengikuti aturan main MBT secara parsial, namun pada perkembangannya mengadopsi total norma ini walaupun secara informal dan tidak menjadi bagian resmi perjanjian MBT. Bower berargumen bahwa pergeseran perilaku ini merupakan poin penting bagi eksistensi kekuatan norma, didukung dengan efek “jejaring struktur sosial hukum internasional.” Meski terdapat usaha untuk menghindari norma MBT melalui struktur legal formal alternatif yang bersifat lebih fleksibel dan kompromistis pemberlakuannya seperti *Amended Protocol II (APII)* dari *the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW)*, yang meregulasikan penggunaan ranjau anti-personel bukan pelarangan total penggunaan senjata ini.²³ Temuan ini tentu bertentangan dengan proyeksi realis bahwa negara kuat akan menghiraukan pemberlakuan norma tersebut dengan alasan kalkulasi strategis dan kapasitas materiil negara *great powers*.

Pada kasus ICC, terdapat perbedaan yang signifikan dan lebih kompleks dalam dinamikanya daripada kasus sebelum. Statuta Roma dikonstruksikan untuk merespons dan mengadili tindakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan di atas hukum kebiasaan internasional, seperti hak imunitas, sebagai inti

²² Adam Bower, *Norms Without Great Powers...*, hlm. 98.

²³ *Ibid.* hlm. 120-122.

norma internasional ini dengan menggunakan perangkat mahkamah supranasional otoritatif dan independen. Norma Statuta ICC didukung dan ditentang oleh dua kelompok negara-negara seperti kasus MBT. Namun, perbedaannya yaitu konsekuensi dari pengakuan terhadap norma ICC. Ratifikasi terhadap Statuta Roma berarti merelakan pemindahan yurisdiksi hukum pidana negara-negara pengesah kepada otoritas independen ICC terkait penindakan kasus kejahatan luar biasa, khususnya pejabat publik dan militer nasional, dengan konteks politik internasional apapun.²⁴

Meskipun pemberlakuan norma ICC juga menjadi standar perilaku yang diterima luas dan ekspektasi sosial masyarakat internasional, tidak terbatas pada negara pengesah semata. Pada prakteknya terdapat konflik kepentingan internal dari pendukung ICC, antar negara pelanggar hak asasi manusia dan aliansinya dengan otoritas berwenang ICC. Pembelaan negara aliansi terhadap pelanggar melalui instrumentalisasi proses hukum internasional dengan *framing* stabilitas regional dan politik domestic seperti kasus penundaan penindakan Presiden dan Perdana Menteri Kenya, Libya, dan Darfur, Sudan. Problem ini menjadi tantangan bagi penegakan hukum dan normal ICC karena dilakukan tanpa kekuatan pemaksa dari negara pendukung. Pada celah ini negara *great powers* berusaha untuk melemahkan independensi dan meragukan status legitimasi ICC, dengan cara menekankan posisi Dewan Keamanan PBB dalam hukum internasional sebagai “aparatus penegak hukum.” Tetapi studi ini menemukan bahwa resistensi negara kuat (AS) terhadap ICC memberikan implikasi negatif yang besar bagi status dan citra baik *great powers* di lingkungan internasional. Sehingga pada akhirnya memaksa negara kuat untuk beradaptasi dengan norma Statuta Roma melalui instrumentalisasi norma secara retorik. Walaupun Bower mengakui bahwa masih banyak tantangan yang muncul dalam penerimaan penuh Statuta Roma, serta hambatan bagi proses internalisasi total norma ICC, perubahan perilaku bertahap dari para penentang telah menunjukkan bahwa ketahanan norma-norma internasional dan prospek untuk

²⁴ *Ibid.* hlm. 123.

mempengaruhi perilaku dan tindakan negara *great powers*, di tengah tantangan yang besar.²⁵

Perbandingan kasus MBT dan ICC di atas jelas menunjukkan perbedaan temuan. Tetapi kedua fakta empiris tersebut menggambarkan bagaimana norma dan aturan yang berlaku memainkan peran besar dalam mempengaruhi pelaksanaan politik internasional, walaupun tingkat pengaruh yang dihasilkan relatif berbeda. Efek dari norma MBT terlihat lebih kuat bagi aktor-aktor internasional, karena dampak negatif dari resistensi terhadap norma lebih besar daripada keuntungan politik yang didapatkan. Sehingga, kecenderungan ini membuat setiap negara mentaati institusi ini dengan pertimbangan strategis, yang mana selanjutnya membuka kemungkinan untuk proses internalisasi norma dikemudian hari, dengan syarat aktor tersebut terlibat aktif dalam diskursus norma ini.²⁶

Sebelum kemunculan aturan pelarangan ranjau anti-personil, penggunaan senjata jenis ini dalam militer dilihat sebagai sesuatu yang lumrah. Tetapi disaat aturan ini diterima sebagai norma internasional, praktik sebelumnya dipandang pelanggaran dan bentuk ketidakpatuhan terhadap norma. Hanya dalam beberapa kasus, penggunaan ranjau masih terjadi dikarenakan politik ekseptional atau pengecualian dengan alasan keterbatasan dan teknis lapangan. Redefinisi makna ketidakpatuhan terhadap norma semakin memperkuat legitimasi status norma MBT dan posisinya dalam hukum internasional, sebagai kewajiban hukum dan moral.

Sementara itu, keterbatasan pengaruh norma Statuta Roma pada aktor-aktor politik global disebabkan oleh hambatan-hambatan substansial. Penyebabnya adalah perselisihan antara ICC dengan negara-negara pengesah, yang mana mewajibkan negara tersebut untuk mengintegrasikan Statuta Roma ke dalam hukum domestiknya.²⁷ Hal ini berimplikasi pada timbulnya sikap setengah hati untuk bekerjasama secara sinergis dengan ICC. Efeknya akan menjadi penghambat bagi proses internalisasi

norma secara mendalam.²⁸ Walaupun demikian, kedua institusi *non-great powers* ini menunjukkan kapasitas normatif dalam mempengaruhi sikap asertif negara-negara kuat dalam menggunakan kapasitas materiilnya, dengan cara “memaksa” *great powers* untuk terlibat secara diskursif dalam kerangka norma internasional terkait.

Pada observasi kedua kasus, efektivitas implementasi multilateralisme “*non-great powers*” beserta efek norma-normanya membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dengan menggunakan teori ini secara variatif dalam kasus-kasus lain sebagai cara untuk memperkuat konseptualisasi dan ketahanan institusi multilateral ini. Untuk itu, Bower mengajukan hipotesis dirumuskan dari studi literatur disiplin ilmu HI sebagai perbandingan bagi kajian sejenis lain. Hipotesis tersebut mencakup bidang-bidang permasalahan, dampak bagi kedaulatan negara, dan skenario penegakan hukum.²⁹

Pertama, bidang masalah merupakan aspek penting dalam mengkaji implementasi suatu hukum internasional, karena pengaruhnya krusial bagi prospek institusi yang kokoh. Kasus diatas menunjukkan keberhasilan pengembangan norma dan aturan baru karena bergantung pada penentangan terhadap pelanggaran kemanusiaan dan persamaan hak sebagai basis narasinya. *Kedua*, dampak bagi kedaulatan negara-negara yang terlibat di dalam suatu institusi. Bower memandang bahwa perilaku ketaatan dan kerjasama negara terhadap aturan dan hukum internasional tergantung dari dampak negatifnya bagi kepentingan inti dan hak prerogatif negara. Studi kasus di atas menjelaskan mengapa efek dari norma ICC tidak mampu merubah perilaku aktor-aktor internasional seperti halnya MBT. Hal ini terjadi disebabkan oleh persyaratan ketat ICC dalam implementasi hukum nasional secara interventif dan mekanisme pelaksanaan hukuman, sebuah keyakinan dan kepentingan substantial negara-bangsa, yaitu. *Ketiga*, di tengah sistem internasional yang anarkis, upaya aktor internasional baik kolektif maupun individual dalam penegakan hukum internasional secara inheren bersifat desentralistik. Dengan

²⁵ Adam Bower, *Norms Without Great Powers...*, hlm. 182-186.

²⁶ *Ibid.* hlm. 186.

²⁷ Adam Bower, *Norms Without Great Powers...*, hlm. 186.

²⁸ *Ibid.* hlm. 168.

²⁹ *Ibid.* hlm. 193.

keadaan demikian, terdapat dua kemungkinan dalam penindakan pelanggaran hukum yaitu melalui penggunaan kemampuan koersif *great powers* atau penindakan berbasiskan kerjasama antar negara secara sukarela. Memang disadari bahwa kasus MBT dan ICC ini tidak memiliki acuan tegas dalam penindakan pelanggaran. Sehingga pelaksanaan ini hanya bergantung pada pemantauan dan pengawasan negara-negara dan aliansi masyarakat madani, dengan kemampuannya untuk menstigmatisasi negatif negara pelanggar dalam ruang sosial internasional, dalam mengimplementasikan fungsi institusi secara efektif. Walaupun memang terdapat banyak hambatan yang dimunculkan *great powers*.³⁰

Jalan Terjal Menuju Institusi Multilateral Independen

Dalam mengantisipasi pesimisme terhadap gagasan *norms without great powers* nya, Adam Bower secara brilian memberikan penjelasan kontefaktual tentang institusi dengan *great powers* di dalam nya. Hasil dari analisis konterfaktual tersebut menunjukkan hasil yang tidak lebih baik dari gagasan *non-great powers*. Eksplanasi yang cermat tersebut memperkuat temuan fundamental studi ini bahwa pengembangan institusi pengaturan (*treaties*) tanpa dukungan *great powers* menjadi sebuah pendekatan yang terbukti berhasil dalam menciptakan norma internasional yang kuat, di tengah situasi yang mengancam persolan kedaulatan dan keamanan-pertahanan negara.³¹ Namun demikian, terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini yaitu mengabaikan ancaman kemerosotan norma dan konseptualisasi identitas.

Sebagai program penelitian Konstruktivisme, pembahasan ini tentu menitikberatkan pada dinamika norma dan pengaruhnya dalam ketaatan perilaku sosial negara³² pada institusi dan hukum internasional. Hanya berfokus dengan

implementasi, tetapi tidak menyinggung sama sekali potensi kemerosotan norma ke depan menjadi suatu kelemahan bagi konsep norma yang diajukan. Kemerosotan norma ini merupakan proses berlawanan dari institusionalisasi norma³³ yang sangat memungkinkan terjadi karena terdapat banyak pelanggaran terhadap norma di tengah resistensi dan perubahan situasi internasional seperti pada kasus ICC.

Selanjutnya, penjelasan dalam kajian ini mengabaikan pentingnya penjelasan konseptual tentang peran identitas dalam interaksi sosial antar-negara. Secara teoritis, Wendt berpendapat bahwa kepentingan (*interest*) bergantung erat dengan identitas (sosial), yang mana didefinisikan sebagai seperangkat pemaknaan yang dipahami oleh aktor dalam berbagai lapis konteks sosial. Hal ini berarti aktor memiliki berbagai bentuk (*multiple*) identitas sosial, dan dalam konteks internasional, identitas sosial ini tidak bisa direduksi dengan melihat identitas aktor secara singular, karena hal demikian akan mengaburkan basis intersubjektif identitas sosial itu sendiri.³⁴ Basis tersebut akan mendefinisikan identitas, persepsi, dan pola hubungannya dengan aktor lain, apakah identitas itu berbasiskan pemaknaan “sahabat” (*friends*) atau “musuh” (*enemies*),³⁵ konflik atau kerjasama, maupun empati atau interdependensi situasional dalam mempersepsikan identitas sosial aktor lain.³⁶ Implikasi dari ketiadaan presentasi konsep identitas dan fokus dinamika norma dan kekuatan sosial hukum internasional semata, tentu sangat berpengaruh besar bagi pemahaman akan keberhasilan implementasi institusi tanpa *great power*.

Konsekuensi dari absennya elaborasi konsep identitas ini adalah dikotomi kaku antar subjek internasional. Negara dengan kapasitas materiil yang besar diistilahkan sebagai *great powers*,

³⁰ Adam Bower, *Norms Without Great Powers...*, hlm. 193-197.

³¹ *Ibid.* hlm. 223.

³² Christian Reus-Smit, *Imagining Society: Constructivism and the English School*, *The British Journal of Politics & International Relations*, 4, 2008: hlm. 493.

³³ Diana Panke dan Ulrich Petersohn, *Why International Norms Disappear Sometimes*, *European Journal of International Relations* 18, no. 4 (December 1, 2012).

³⁴ Alexander Wendt, *Collective Identity Formation and the International State*, *The American Political Science Review*, Vol. 88, No. 2 (Jun., 1994), hlm. 385-386.

³⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional...*, hlm. 260.

³⁶ Alexander Wendt, *Collective Identity Formation...*, hlm. 386.

seperti AS, Tiongkok, dan Rusia, sedangkan *non-great powers* dilihat sebagai kelompok aktor-aktor *small-middle powers* dengan kapabilitas materiil terbatas, tanpa senjata nuklir, dan hak veto di DK-PBB, mengikuti Bolton dan Nash.³⁷ Tentu kategorisasi ini bermasalah karena Inggris dan Perancis, sebagai bagian dari “diplomasi baru” dan pendukung norma MBT dan ICC, secara kriteria objektif masuk dalam kategorisasi negara kuat. Akan tetapi, buku ini mereduksi peran dan statusnya ke dalam kelompok *non-great powers* dengan keterbatasan kekuatan individual dalam menindak aktor pelanggar norma dan hukum. Tendensi ini juga menunjukkan penafsiran keliru tentang kedua aktor ini karena diasosiasikan dengan aktor yang terbebas dari ikatan kepentingan dan identitas politik *great powers*, terutama pada proses pembentukan dan implementasi institusi multilateral independen.

Absennya penjelasan khusus tentang konsep identitas dalam mendukung analisa *power politics* menimbulkan ambiguitas terhadap eksistensi *social identity of power*³⁸ pada tingkat operasionalisasi teori. Bower secara jelas menekankan bahwa kajian ini berkaitan erat antara dinamika norma dan *power* dalam politik internasional, khususnya dimensi sosial kekuasaan yang diekspresikan melalui jalur diskursif.³⁹ Bower merujuk konsep kekuasaan dalam pemerintahan global ini kepada Barnett dan Duvall, yang mana *power* yang direproduksi dari proses interaksi sosial dan termanifestasikan dalam banyak bentuk,⁴⁰ yaitu *compulsory power*, *institutional power*, *structural power*, dan *productive power*.⁴¹ Walaupun konseptualisasi *power* yang dikutip sangat komprehensif dan

meyakinkan, terdapat kegagalan dalam melihat *identity of power* yang berbaur dengan mengikuti bentuk norma universal yang dipromosikan. Sehingga, bentuk *power* yang demikian berhasil mengaburkan batas-batas tegas antara norma-norma universal yang murni untuk kepentingan seluruh aktor-aktor terlibat dan norma-norma dengan muatan kepentingan politis yang parsial di belakangnya, seperti contoh kekuatan normatif Eropa.

Kekuatan normatif Eropa (*normative power Europe*)⁴² merupakan gagasan dilabelkan bagi keaktoran internasional Uni Eropa (EU) sebagai subjek internasional yang berperan besar dalam usaha mempromosikan norma-norma cosmopolitan (perdamaian, demokrasi, hak asasi manusia, *rule of law*, dan *good governance*). Manners mengklaim bahwa secara historis norma-norma universal tersebut muncul pada konteks Eropa dan secara otomatis dikaitkan dengan identitas aktor (UE), termasuk anggotanya.⁴³ Ekspansi dan penguatan norma-norma yang dilakukan dalam interaksi sosial UE di arena internasional, memberikan legitimasi pada citra dan identitas UE sebagai pembela norma-norma fundamental. Namun, dalam beberapa kasus dikawasan Mediterania, promosi demokrasi dan hak asasi manusia dilaksanakan dengan kalkulasi rasional bagi kepentingan ekonomi dan strategi UE karena komitmen terhadap norma yang dinarasikan ternyata dilakukan secara inkonsisten dan selektif pada tingkat praktis. Dengan kata lain, terdapat sikap hipokrisi UE yang terlihat dari kesenjangan antara retorika dan tindakan yang terjadi dalam kasus tertentu.⁴⁴

Selain itu, konsekuensi lain dari absennya elaborasi konsep identitas sosial yaitu gagalnya melihat mobilisasi politik identitas kolektif yang bermain dalam institusi *non-great powers*. Interdependensi kompleks memberikan elemen dasar bagi pembentukan identitas kolektif bagi negara-negara yang disatukan dengan ikatan

³⁷ Matthew Bolton and Thomas Nash, *The Role of Middle Power-NGO Coalitions in Global Policy: The Case of the Cluster Munitions Ban*. *Global Policy* 1, 2 (2010), hlm. 172–184.

³⁸ Istilah ini merujuk pada suatu bentuk kekuatan (*power*) yang dihubungkan dengan kombinasi antara pengalaman historis, kemampuan sosial, konfigurasi normatif dan kultural dari identitas aktor-aktor internasional tertentu.

³⁹ Adam Bower, *Norms Without Great Powers...*, hlm. 5.

⁴⁰ Michael Barnett dan Raymond Duvall, *Power in Global Governance*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 8.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 3.

⁴² Ian Manners, *Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?*, *Journal of Common Market Studies*, 40, 2002, hlm. 238-241.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 240-244.

⁴⁴ Brieg Tomos Powel, *A Clash of Norms: Normative Power and EU Democracy Promotion in Tunisia*, *Democratization* 16, no. 1 (February 1, 2009), hlm. 195-197.

kesamaan kepentingan, struktur ideasional, dan sejarah.⁴⁵ Pembentukan identitas kolektif ini terjadi pada satu titik momen sejarah dimana interaksi sosial antar negara-negara yang memiliki kesamaan negara-negara ini dalam satu bidang, berlanjut pada proses internalisasi identitas kolektif secara bertahap, dan pada akhirnya persepsi kesamaan kepentingan dan solidaritas komunitas mulai mengakar kedalam identitas individu negara-negara tersebut. Identitas kolektif ini lah yang menjadi referensi negara-negara dalam melaksanakan hubungan dan politik internasional, seperti identitas komunitas transatlantik AS dan Eropa, NATO, UE, dsb. Mobilisasi kepentingan dengan basis solidaritas dan identitas kolektif yang terjadi pada situasi dimana ICC sangat menggantungkan penindakan keputusan penanganan kepada peran aktif negara yang relatif lebih kuat diantara anggotanya seperti Inggris dan Prancis. Kedua negara ini merupakan aliansi historis AS (*great powers*),⁴⁶ dan komitmen untuk menindak lanjuti keputusan secara objektif dan imparial tentu dipertanyakan, bahkan dapat mengancam kohesi dan komitmen bagi norma dan institusi *per se*.

Permasalahan di atas ini menjadi tambahan bagi permasalahan potensial yang telah diidentifikasi oleh Bower bagi hukum yang dipromosikan negara-negara *non-great power*. Problem-problem potensial yang dimaksud yaitu mengenai ketidakberlakuan aturan internasional bagi negara non-pengesak dan negara kuat, institusi yang dibentuk *great powers* sebagai alat bagi kepentingan nasionalnya, dan ketidakefektifan implementasi institusi tanpa dukungan negara kuat.⁴⁷ Dengan demikian, penjelasan di atas menunjukkan bahwa eksistensi hambatan-hambatan bagi upaya negara-negara *non-great power* dan koalisi “diplomasi baru” untuk mewujudkan institusi multilateral yang independen jauh lebih kompleks dan sukar daripada analisis buku ini.

⁴⁵ Alexander Wendt, *Collective Identity Formation...*, hlm 386.

⁴⁶ Adam Bower, *Norms Without Great Power...*, hlm 171

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 27-29

Penutup

Secara umum, buku *Norms Without Great Powers*⁴⁸ ini telah menghadirkan nuansa dan referensi baru mengenai perdebatan tentang masa depan multilateralisme dan kekuatan hukum internasional. Hal ini dipandang menarik karena analisis masalah yang dipresentasikan dengan perspektif konstruktivisme berhasil keluar dari dominasi paradigma arus utama disiplin ilmu hubungan internasional dalam kajian tentang *power politics*, yang menitik beratkan pada faktor kapabilitas material dan pendekatan *rational-choice* dalam sistem internasional. Khususnya perhatian utamanya pada peran perubahan sosial dan hukum internasional dalam dinamika politik global, didukung oleh kekayaan data empiris. Kesimpulan yang dihasilkan dapat membantah pandangan skeptik terhadap kemungkinan keberhasilan institusi multilateral *non-great power* dalam menegakkan hukum internasional normatif dalam studi kasus MBT dan ICC. Sehingga, buku ini layak diapresiasi karena telah menghadirkan optimisme terhadap prospek institusi multilateral yang independen tanpa intervensi kepentingan *great powers*, menggunakan kekuatan sosial dan normatif dari hukum internasional

Daftar Pustaka

Buku

- Barnett, Michael N., and Raymond Duvall. *Power in Global Governance*, Cambridge University Press, 2005.
- Bower, Adam. *Norms Without the Great Powers: International Law and Changing Social Standards in World Politics*. Oxford University Press, 2017.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

⁴⁸ Terdapat juga disertasi doctoral dengan pembahasan norma fundamental dan *power* dan menyoroti faktor-faktor material dan ideasional yang mendasari konflik pengaruh antara norma fundamental dan kekuatan *great powers* dalam membentuk sistem internasional, sebagai referensi alternatif. Lihat: Johanne Grøndahl Glaving, *Can Great Powers Change Fundamental Norms?: A Theoretical and Empirical Assessment of the Strength of Fundamental Norms in post-2001 International Society*. Disertasi Phd., Aarhus Universitet 2011.

Jackson, Robert H., and Georg Sørensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford University Press, 2013.

Glaving, Johanne Grøndahl. *Can Great Powers Change Fundamental Norms? A Theoretical and Empirical Assessment of the Strength of Fundamental Norms in Post-2001 International Society*. Aarhus Universitet, 2011.

Jurnal

Bolton Matthew, and Nash Thomas. "The Role of Middle Power–NGO Coalitions in Global Policy: The Case of the Cluster Munitions Ban." *Global Policy*. vol. 1. no. 2 (May 2010): 172–84.

Brown, Chris. "Do Great Powers Have Great Responsibilities? Great Powers and Moral Agency." *Global Society*. vol. 18. no. 1 (Jan. 2004): 5–19.

Goldsmith, Jack. "The Self-Defeating International Criminal Court." *The University of Chicago Law Review*. vol. 70. no. 1 (2003): 89–104.

Keohane, Robert O. "The Demand for International Regimes." *International Organization*. vol. 36. no. 2 (1982): 325–55.

Manners, Ian. "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?" *JCMS: Journal of Common Market Studies*. vol. 40. no. 2 (June 2002): 235–58.

Panke, Diana, and Ulrich Petersohn. "Why International Norms Disappear Sometimes." *European Journal of International Relations*. vol. 18. no. 4 (Dec. 2012): 719–42.

Powel, Brieg Tomos. "A Clash of Norms: Normative Power and EU Democracy Promotion in Tunisia." *Democratization*. vol. 16. no. 1 (Feb. 2009): 193–214.

Wendt, Alexander. "Collective Identity Formation and the International State." *The American Political Science Review*. vol. 88. no. 2 (1994): 384–396.

Sumber Internet

Bremmer, Ian. 2018. "Donald Trump's Foreign Policy Is a Black Box." *Time*, <http://time.com/4564673/president-donald-trump-foreign-policy/>.

Landler, Mark. 2017. "Trump Recognizes Jerusalem as Israel's Capital and Orders U.S. Embassy to Move." *The New York Times*, 6 Desember.

Nichols, Michelle. 2017. "Defying Trump, over 120 Countries at U.N. Condemn Jerusalem Decision." *Reuters*, 22 Desember. www.reuters.com, <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel-un/u-s-says-under-attack-at-u-n-over-jerusalem-repeats-aid-threat-idUSKBN1EF2D5>.

United Nations. 2016. "Syrian Tragedy 'Shames Us All', Secretary-General Tells Security Council, Saying That Failure to End Conflict Should Haunt Entire Membership | Meetings Coverage and Press Releases." United Nations, 21 September. <https://www.un.org/press/en/2016/sc12526.doc.htm>

TENTANG PENULIS

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini penulis tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI. Penulis dapat dihubungi melalui email: indriana.kartini@gmail.com

Meutya Viada Hafid

Penulis merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar sejak 2009 hingga kini. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dan memulai karirnya sebagai jurnalis di Metro TV. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. adapun penulis dapat dihubungi melalui email: meutyahafidinfo@gmail.com

Arif Novianto

Penulis merupakan Asisten peneliti di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Peneliti di Pusat Studi Jerman UGM pada tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

Lukman Kurniawan

Penulis merupakan Alumnus Departemen Sosiologi FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman pada tahun 2015.

Samodra Wibawa

Penulis merupakan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman.

Siswanto

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia. Tergabung dalam tim penelitian Politik Luar Negeri, penulis sudah banyak menghasilkan karya-karya baik buku maupun jurnal. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: sish_jakarta@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kajiannya adalah perbatasan. Sudah banyak karya berupa buku maupun jurnal yang ditulis oleh beliau. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: irewati62@gmail.com

M. Fakhry Ghafur

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam tim penelitian Agama dan Politik. Bidang kajiannya meliputi Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Penulis dapat dihubungi di email: fachryghafur@gmail.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis merupakan peneliti madya di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus kajiannya adalah Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Penulis dapat dihubungi melalui email: nyimas.letty@gmail.com; nyimas.letty@yahoo.com

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia merupakan Alumnus *Global Studies Programme Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg*, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

